

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
(SAP), PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

Oleh:

**KHOLILA POHAN**

**NIM 52154096**

Program Studi

Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
(SAP), PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)  
Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara**

Oleh :

**KHOLILA POHAN**

**NIM. 52.15.409.6**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kholila Pohan**  
Nim : 52154096  
Tempat/ tgl. Lahir : Sihiuk, 08 November 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Sihiuk Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PADANG LAWAS**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikiaan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Materai  
6000

**Kholila Pohan**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: “**Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas.**” An. Kholila Pohan, NIM 52154096 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 02 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 06 Agustus 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah UIN SU  
**Sekretaris,**

**Ketua,**

**Yusrizal SE,M.Si**  
**NIP. 197505222009011006**

**Fauzi Arif Lubis,MA**  
**NIP. 198412242015031004**

**Anggota**

**1. Rahmat Daim Harahap, M. Ak**  
**NIP. 19900926 201803 1 001**

**2. Hendra Harmain, M.Pd**  
**NIP. 19730510 199803 1 003**

**3. Kamilah,SE,AK,M.Si**  
**NIP. 19790232 00801 2 014**

**4. Yusrizal SE,M.Si**  
**NIP. 19750522 200901 1 006**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
**NIP. 19760507 200604 1 002**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas**”, atas nama Kholila Pohan. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MA dan Pembimbing II oleh Ibu Kamilah, SE, AK, M.Si.

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi diperlakukan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kerja sehingga turut menentukan dapat tidaknya suatu organisasi terus berlanjut. Informasi akuntansi yang berkualitas membantu para pengguna informasi dalam membuat keputusan yang bermanfaat. Ketidaktepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan mengganggu kualitas laporan keuangan terutama aspek relevan dan andal. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Pemerintah Daerah harus memiliki sumberdaya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah kabupaten padang lawas. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang bekerja sebagai bendahara dan pegawai bagian akuntansi/keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data diolah dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Puji dan syukur alhamdulillah, penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas**” Dan tak lupa pula shalawat beriring salam, penulis ucapkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada dua makhluk luar biasa yang menjadi perantara lahirnya Penulis di muka bumi ini, ialah kedua orang tua Penulis, Bapak Zam Zam Pohan dan Ibu Asmidar Pulungan

tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan tak pernah henti serta doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kusmilawaty, S.E, AK, M.AK selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang telah sangat banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, pemahaman dalam menyelesaikan akademik ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Kamilah, S.E, Ak, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
7. Kepada Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada Sahabatku sekaligus geng squad ISIM (Ayu, Nurul, Yati, Una, Pebri, Rizky Au, Synar, Riri dan Sanah) terimakasih telah memberikan dukungan, bantuan, dan banyak kenangan yang menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.
9. Kepada the kost (febi, eka, yanti, minah) terimakasih atas dukungan dan keributannya serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Edakku Tercinta Leli herawana Lubis yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Teman-teman AKS-C yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 31 Juli 2019

Penulis

Kholila Pohan

NIM.52154096



## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	i
Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar ...	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar ....	xi

### BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah .....	4
1. Identifikasi Masalah .....	4
2. Batasan Masalah .....	4
3. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5

### BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kualitas Laporan Keuangan .....	7
1. Pengertian .....	7
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	10
3. Landasan Syar'i Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
B. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .....	16
1. Pengertian .....	16
2. Kerangka Konseptual SAP .....	18
3. Komponen Pernyataan SAP .....	19
C. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) .....	22
1. Pendidikan .....	23
2. Pelatihan .....	24
3. Jenis dan Jenjang Diklat .....	24

4. Hubungan Pendidikan dengan Kinerja Pegawai .....	26
5. Hubungan Pelatihan dengan Kinerja Pegawai .....	26
6. Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kinerja Pegawai .....	26
7. Tujuan dan Manfaat Diklat .....	27
8. Metode Diklat.....	29
9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diklat .....	30
10. Pentingnya Diklat.....	29
D. Penelitian Terdahulu .....	31
E. Kerangka Teoritis.....	37
1. Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas .....	37
2. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas .....	37
F. Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Populasi dan Sampel .....	41
E. Defenisi Operasional.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Analisis Data .....	46
1. Uji Kualitas Data.....	46
2. Analisis Statistik Deskriptif .....	48
3. Uji Asumsi Klasik .....	48
4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Padang Lawas .....	51
1. Kondisi Geografis Daerah.....	51
2. Struktur Organisasi.....	53
3. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas .....	54

B. Hasil Penelitian Kualitas Laporan Keuangan .....	56
1. Gambaran Pengembalian kuesioner .....	56
2. Uji Kualitas Data.....	56
a. Uji Validitas .....	56
b. Uji Reliabilitas .....	58
3. Uji Statistik Deskriptif .....	60
4. Uji Asumsi Klasik .....	67
a. Uji Normalitas.....	67
b. Uji Multikolinearitas .....	69
c. Uji heteroskedastisitas.....	70
5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
6. Uji Hipotesis.....	73
a. Uji Sinifikansi Simultan (Uji F) .....	73
b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	74
c. Analisis Koefisien Determinasi.....	75
7. Pembahasan Hasil Penelitian .....	76
BAB V Kesimpulan dan Saran .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka .....	80
Lampiran .. ..	
Daftar Riwayat Hidup .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 : populasi Penelitian dan Responden .....	41
Tabel 3.2 : Indikator Variabel .....	45
Tabel 3.3 : Skala Pengukuran Likert.....	46
Tabel 4.1 : Uji Validitas Variabel X1 .....	57
Tabel 4.2 : Uji Validitas Variabel x2 .....	57
Tabel 4.3 : Uji Validitas Variabel Y .....	58
Tabel 4.4 : Uji Reliabilitas .....	59
Tabel 4.5 : Distribusi Frekuensi X1 .....	60
Tabel 4.6 : Distribusi Frekuensi X2 .....	62
Tabel 4.7 : Distribusi Frekuensi Y .....	64
Tabel 4.8 : Statistik Deskriptif .....	66
Tabel 4.9 : Uji Normalitas Kolmogorov Simirnov .....	68
Tabel 4.10 : Uji Multikolinearitas .....	70
Tabel 4.11 : Analisis Regresi Linear Berganda .....	72
Tabel 4.12 : Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	73
Tabel 4.13 : Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	74
Tabel 4.14 : Uji Koefisien Determinasi .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Teoritis .....	37
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi .....	53
Gambar 4.2 : Uji Normalitas Normal Probability Plot .....	69
Gambar 4.3 : Uji Normalitas Histogram .....	69
Gambar 4.4 : Hasil Uji Heterokedastisitas .....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Tahun 2017 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7). Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi diperlakukan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kerja sehingga turut menentukan dapat tidaknya suatu organisasi terus berlanjut. Informasi akuntansi yang berkualitas membantu para pengguna informasi dalam membuat keputusan yang bermanfaat. Ketidaktepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan mengganggu kualitas laporan keuangan terutama aspek relevan dan andal. Ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengemukakan bahwa penyebab tidak terpenuhinya syarat kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak tercapainya penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah paling dominan antara lain disebabkan gangguan layak saji aset tetap di neraca pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak akurat dan andal dapat menyebabkan pengambilan keputusan

---

<sup>1</sup>MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan: UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017)

ekonomi yang keliru dan pada gilirannya dapat menghambat perencanaan jangka menengah dan pencapaian target-target pembangunan.

Faktor lainnya terkait kualitas laporan keuangan adalah kepatuhan dan pemahaman terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).<sup>2</sup> Adanya keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Pemerintah Daerah harus memiliki sumberdaya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Sebagian besar pegawai negeri bagian keuangan tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya serta belum memahami sepenuhnya tentang akuntansi. Pengembangan pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan untuk mempermudah pegawai dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggungjawab yang diberikan. Ketidapahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

---

<sup>2</sup> Eriadi. *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara Dengan Efektivitas Reviu APIP Sebagai Pemoderasi*. (Disertasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018). Hal. 1-3

2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.<sup>3</sup>

Adanya gangguan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari capaian opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2016 sampai dengan 2017 Kabupaten Padang lawas mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) padahal opini yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dikarenakan masih adanya aset tetap yang dilaporkan tidak dilengkapi dengan penyesuaian harga.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara peneliti, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Pelaporan Keuangan meskipun sudah melakukan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena terkadang diklat yang dilakukan kurang efektif dan efisien serta seringkali diklat tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan jabatan saja.

Adapun fenomena yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas yang dapat dilihat bahwa penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) belum sepenuhnya memahami dan mengerti untuk melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang pada umumnya tidak memiliki disiplin ilmu dan bukan berasal dari pendidikan akuntansi, sehingga akan menyulitkan PPK-

---

<sup>3</sup><http://digilib.unimed.ac.id/13694/6/709330034%20BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

<sup>4</sup> Bapak Jam Jam, bendahara SKPD, wawancara pada tanggal 29 April 2019



SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas”**.

## **B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah**

Pada bab ini akan di bahas identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan penulis, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang menguasai pendidikan dan pelatihan pengelolaan anggaran laporan keuangan dan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti hanya membatasi penelitiannya pada dua variabel, yaitu variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada perangkat SKPD yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang mengambil lokasi pada pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan Kabupaten Padang Lawas?

- b. Apakah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan Kabupaten Padang Lawas?
- c. Apakah pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) secara simultan maupun parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pada bab ini akan dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap Kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini agar dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang pengaruh SAP, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di Pemerintah Daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Disamping itu, melalui penelitian ini pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, serta meningkatkan SDM dalam menyusun laporan keuangan daerah melalui pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan (diklat).

c. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Kualitas Laporan Keuangan**

##### **1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. Jadi laporan keuangan merupakan informasi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu entitas yang biasanya diterbitkan setiap tahun.

Menurut Triyanti laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Informasi keuangan memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.<sup>1</sup>

Menurut Rizky “Laporan Keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan, dan laporan posisi keuangan”.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas merupakan tingkat atau taraf baik buruknya sesuatu. Kualitas dalam hal ini berarti merupakan tingkat baik buruknya kondisi keuangan

---

<sup>1</sup>Triyanti, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 13

<sup>2</sup> Rizky Amalia, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Transparansi dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 19

organisasi/pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangannya.<sup>3</sup>

Pengertian kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.<sup>4</sup> Keempat karakteristik tersebut sebagai berikut:

#### 1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

##### a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

##### b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Triyanti, hal. 13

<sup>4</sup> Febrian Cahyo Pradono Basukianto. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2015, hal. 188-200 ISSN: 1412-3126

#### d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### 2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### 3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: Materialitas, Pertimbangan biaya dan manfaat, dan Keseimbangan antarkarakteristik kualitatif.<sup>5</sup>

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan SKPD, yaitu sebagai berikut:

### a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama

---

<sup>5</sup> Erlina, et all. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Hal.8-11

sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

b. Teknologi Informasi

Teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

c. Peran PPK-SKPD

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain: menyiapkan laporan keuangan SKPD, dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran.

d. Rekonsiliasi

Sesuai Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

e. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan



kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelegkapan informasi.<sup>6</sup>

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Mardiasmo menyebutkan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu: kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan kepatuhan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, dan sumber fakta dan gambaran.<sup>7</sup>

### **3. Landasan Syar'i Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam surah al-baqarah ayat 282 dibahas masalah muamalah. Termasuk didalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran (truth), kepastian (certainty), keterbukaan (accountability) dan keadilan (fairness) antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan transaksi.

---

<sup>6</sup> Febrian Cahyo Pradono Basukianto. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Hal. 190-191

<sup>7</sup> Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. ed. 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2010). hal. 125-126.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalny atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282).<sup>8</sup>

Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 3 tentang Surat Al-Baqarah ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut: "Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena baik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Sianu mati dalam berutang, tempat berutang menagih pada warisnya yang tinggal. Siwaris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian".

Beliau mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Dan perintah inilah yang selalu diabaikan umat islam sekarang ini. Bahkan yang lebih parah sudah sampai situasi seolah-olah menulis transaksi seperti ini menunjukan kekurangan percayaan satu sama lain pada hal ini merupakan perintah Allah SWT kepada umatnya yang tentu harus dipatuhi.<sup>9</sup>

Selain surah Al-Baqarah ayat 282, ada juga surah An-Nisa ayat 135 tentang pertanggungjawaban yaitu:

---

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah: 282.

<sup>9</sup> Nurhikmah. *Hadis Yang Berhubungan Tentang Pembukuan Pencatatan (Transaksi)*. <http://hikmahangelf.blogspot.com/2014/04/hadis-yang-berhubungan-tentang.html>. Diunduh pada tanggal 05 Desember 2018

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

Seorang pencatat harus memiliki karakter yang baik , jujur, adil dan dapat dipercaya. Dan tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi keadilan antara keduanya. Jujur menuliskan apa yang dia seharusnya tulis. Dan harus dapat menjaga amanah yang diberikan.<sup>11</sup> Laporan ini didukung bukti, dimana tidak ada satupun transaksi yang dilakukan oleh manusia yang luput dari pengawasan Allah dan didalam pencatatan tersebutlah akan didapat penyusunan laporan keuangan. Agar ada keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan mendorong penerapan akuntansi yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 agar sesuai dengan standar yang diterapkan.

<sup>10</sup> Q.S. An-Nisa: 135.

<sup>11</sup> Ibid. Nurhikmah. *Hadis Yang Berhubungan Tentang Pembukuan Pencatatan (Transaksi)*

## B. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

### 1. Pengertian

#### a. Pengertian Standar Akuntansi

Menurut Ranny standar laporan keuangan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.<sup>12</sup>

Menurut Arlia Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Defenisi pemahaman menurut KBBI adalah pengertian, pengetahuan, banyak dan kurang, pendapat, pandangan, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Arlia standar akuntansi pemerintah merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.<sup>13</sup>

Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Biasanya berisi tentang definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan:

---

<sup>12</sup> Ranny Hanaffi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati)*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017), hal. 24

<sup>13</sup> Arlia Sari Artana, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016), hal. 26

- 1) Memberi informasi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal hal yang berkaitan dengan perusahaan.
- 2) Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan.
- 3) Memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya.
- 4) Menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.

Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian:

- a) Deskripsi tentang masalah yang dihadapi.
- b) Diskusi logis cara pemecahan masalah.
- c) Dalam kaitannya dengan keputusan teori, diajukan suatu solusi.<sup>14</sup>

#### b. Pengertian Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah atau PP No 71 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 Point 2, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Accounting Principles Board atau APB, Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil dari proses tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Uchiikhusy. *Standar Akuntansi*. <https://uciikhusy.wordpress.com/2012/02/09/standar-akuntansi/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2018

<sup>15</sup> Ifat Fauziah. *Buku Dasar-Dasar Akuntansi Untuk Orang Awam dan Pemula*. cet. 1 (Pamulang: Ilmu, 2017). hal. 1.

### c. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual SAP

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan SAP.<sup>17</sup>

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi:

- 1) Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- 3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP.
- 4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Kerangka konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP.

---

<sup>16</sup> Deddi Nordiawan dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. ed. 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 1.

<sup>17</sup> PP No 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2005). hal. 3-4.

Namun jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Hal-hal yang dibahas dalam kerangka konseptual SAP:

- 1) Lingkungan akuntansi pemerintahan.
- 2) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna.
- 3) Entitas pelaporan.
- 4) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum.
- 5) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dan laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi.
- 6) Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Kerangka konseptual SAP menekankan perlunya mempertimbangkan ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting tersebut meliputi: Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, dan sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.<sup>18</sup>

### **3. Komponen Pernyataan SAP**

#### **1) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan**

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

---

<sup>18</sup> Nordiawan. *Akuntansi Pemerintahan*. hal. 124.



Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

2) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan dari standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

4) PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan dari standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

5) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

6) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

8) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk: Identifikasi pekerjaan yang dapat di klasifikasikan sebagai Kontruksi dalam Pengerjaan, Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, serta Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

11) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### C. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Dalam PP RI No. 101 Tahun 2000 pasal 1 yang dimaksud dengan Diklat adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Diklat menurut PP RI No. 101 Tahun 2000 pasal 2, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>19</sup> PP No 24 Tahun 2005. hal. 61-284.

- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik

## 1. Pendidikan

Dalam arti luas, pendidikan adalah segala sesuatu dalam kehidupan yang mempengaruhi pembentukan berpikir dan bertindak individu. Kurun waktu kehidupan yang panjang dan saling berkaitan dengan perubahan-perubahan cara berpikir masyarakat juga turut menjadi pembentuk seorang individu. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama (sebagai tanggung jawab) negara. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Dalam hal inilah, letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya mengikuti perkembangan corak sejarah manusia. Tidak heran jika R.S. Peters dalam bukunya *The Philosophy of Education* menandakan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat. Dilihat dari maknanya yang sempit pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga tempat mendidik (mengajar). Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepadanya (sekolah) agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan berkesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>20</sup>

Menurut Andrew E. Sikula disebutkan bahwa Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan umum dan pemahaman

---

<sup>20</sup> Nurani Soyomukti. *Teori—Teori Pendidikan: Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015). Hal. 22-30.

terhadap lingkungan kehidupan manusia secara menyeluruh dan proses pengembangan pengetahuan kecakapan/keterampilan, pikiran, watak, karakter dan sebagainya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan adalah Usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

## **2. Pelatihan**

Menurut Hardjanto, pelatihan adalah Bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Pelatihan (training) menurut Edwin B. Flippo, sebagaimana dikutip oleh Hasibuan, yaitu merupakan Suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang pegawai untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Menurut pasal 1 ayat 9 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pelatihan adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

## **3. Jenis dan Jenjang Diklat Menurut PP RI No. 101 Tahun 2000 pasal 4-12**

### **a. Diklat Prajabatan**

- 1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- 2) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- 3) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

- 4) Diklat Prajabatan terdiri dari:
  - a) Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
  - b) Diklat Prajabatan Gol II untuk menjadi PNS Golongan II
  - c) Diklat Prajabatan Gol III untuk menjadi PNS Golongan III
- b. Diklat Dalam Jabatan
  - 1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-Baiknya.
  - 2) Jenis Diklat dalam jabatan yaitu:
    - a) Diklat kepemimpinan, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
    - b) Diklat fungsional, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-Masing.
    - c) Diklat teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
  - 3) Diklat dalam jabatan terdiri dari:
    - a) Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV
    - b) Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III.
    - c) Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II
    - d) Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I

#### **4. Hubungan Pendidikan dengan Kinerja Pegawai**

Pendidikan merupakan faktor yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan menempuh tingkat pendidikan tertentu menyebabkan seorang pegawai memiliki pengetahuan tertentu sehingga mampu serta cakap untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian pendidikan akan mempengaruhi kinerja pegawai.

#### **5. Hubungan Pelatihan dengan Kinerja Pegawai**

Kemampuan pegawai dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi/instansi dipengaruhi oleh berbagai faktor secara internal, salah satunya adalah melalui pelatihan, dimana melalui program tersebut diharapkan organisasi/instansi dapat mempertahankan pegawai yang berpotensi dan berkualitas. Pelatihan (training) merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seseorang pegawai untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dengan adanya peningkatan keahlian, pengetahuan, wawasan, dan sikap karyawan pada tugas-tugasnya melalui program pelatihan yang sudah dilaksanakan dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja pegawai organisasi tersebut.

#### **6. Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kinerja Pegawai**

Hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai saling mempengaruhi, dimana diasumsikan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan respon terhadap suatu kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Sudiro, yang menyatakan bahwa: Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi ialah melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terencana dan sistematis. Dengan kata lain pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam organisasi adalah perbaikan kinerja pegawai yang meliputi knowledge dan ketrampilan

yang mendukung, serta pembentukan sikap setiap para pegawai sesuai yang diinginkan oleh organisasi.<sup>21</sup>

## 7. Tujuan dan Manfaat Diklat

Menurut Abdurrahman Fatoni tujuan diklat pada umumnya dalam rangka pembinaan terhadap para pegawai agar dapat:

- a. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat.
- b. Meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinannya.
- c. Melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas.
- d. Melatih dan meningkatkan kerja dalam perencanaan.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan Diklat adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- 2) Menciptakan pegawai yang mampu berperan sebagai pembaruan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Menetapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah dipaparkan di atas terdapat kaitan pengaruh antara

---

<sup>21</sup> Edi Saputra Pakpahan, dkk. *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai*, dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1.



pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai. Tujuan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan indikator dari kinerja yaitu:

- a) Melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan melaksanakan tugas berkaitan dengan indikator kinerja yaitu kualitas dan inisiatif dalam bekerja.
- b) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja berkaitan dengan indikator kinerja yaitu pengetahuan.
- c) Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat berkaitan dengan indikator kinerja yaitu tanggung jawab.
- d) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi berkaitan dengan indikator kinerja yaitu disiplin kerja.

Tujuan pendidikan dan pelatihan di atas menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, hal tersebut bisa dilihat dari tujuan dari diklat yang sejalan dengan indikator pengukuran kinerja. Pendidikan dan pelatihan juga memiliki beberapa manfaat yang sangat penting, menurut Wursanto, ada berbagai manfaat pendidikan dan pelatihan pegawai, yaitu:

- 1) Pendidikan dan pelatihan meningkatkan stabilitas pegawai, artinya hubungan pergantian dengan pegawai lainnya yang tidak hadir.
- 2) Pendidikan dan pelatihan dapat memperbaiki cara kerja pegawai, artinya pegawai lebih kreatif dalam menjalankan pekerjaannya.
- 3) Pendidikan dan pelatihan memberi manfaat yang sangat baik bagi pegawai, karena dengan pendidikan dan pelatihan

pegawai dapat berkembang dengan cepat, efisien dan melaksanakan tugas dengan baik.

- 4) Pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri.

Tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai agar lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai. Sedangkan manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan stabilitas pegawai dan dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## **8. Metode Diklat**

Adapun metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program pelatihan menurut Dessler yaitu:

- a. On the job training (pelatihan di tempat kerja), merupakan pelatihan kepada pegawai untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya.
- b. Job instruction training (pelatihan instruksi jabatan), merupakan pendaftaran masing-masing tugas dasar jabatan, bersama dengan titik-titik kunci untuk memberikan pelatihan langkah demi langkah kepada pegawai.
- c. Lectures (pembelajaran), pelatihan dengan cara yang cepat dan sederhana dalam menyajikan pengetahuan kepada para peserta pelatihan, seperti ketika para penjual harus diajarkan ciri spesial dari sebuah produk baru.
- d. Audio visual training (pelatihan audio visual), pelatihan pegawai dengan menggunakan teknik audio visual seperti film,

televisi, audio tape dan video tape, cara ini dapat menjadi sangat efektif dan digunakan secara meluas.

- e. Programmed learning (pembelajaran terprogram), suatu metode sistematis untuk mengajarkan keterampilan yang mencakup penyajian pertanyaan atau fakta, memungkinkan pegawai untuk memberikan tanggapan dan memberikan peserta belajar umpan balik segera tentang kecermatan jawabannya.
- f. Vestibule or simulated training (pelatihan serambi atau simulasi), pelatihan pegawai pada peralatan khusus diluar tempat kerja, seperti pelatihan pilot dalam pesawat, sehingga biaya dan bahaya dapat dikurangi.
- g. Training computer assisted instruction (pelatihan berdasarkan komputer), merupakan pelatihan pegawai dengan menggunakan komputer, pelatihan ini menggunakan sistem berdasarkan komputer secara interaktif meningkatkan pengetahuan atau keterampilan peserta pelatihan. Pelatihan berdasarkan komputer hampir selalu mencakup penyajian para peserta pelatihan dengan simulasi terkomputerisasi dan penggunaan multimedia termasuk video tape untuk membantu peserta pelatihan belajar bagaimana melakukan pekerjaannya.

## **9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diklat**

Faktor-faktor yang menunjang kearah keberhasilan pelatihan menurut Veithzal yaitu antara lain:

- a. Materi yang Dibutuhkan: Materi disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan dalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang dibutuhkan.
- b. Metode yang Digunakan: Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.
- c. Kemampuan Widyaiswara/Instruktur Pelatihan: Mencari sumber-sumber informasi yang lain yang mungkin berguna dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.

- d. Sarana atau Prinsip-prinsip Pembelajaran: Pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif.
- e. Peserta Pelatihan: Sangat penting untuk memperhitungkan tipe pekerja dan jenis pekerja yang akan dilatih.
- f. Evaluasi Pelatihan: Setelah mengadakan pelatihan hendaknya di evaluasi hasil yang didapat dalam pelatihan, dengan memperhitungkan tingkat reaksi, tingkat belajar, tingkat tingkah laku kerja, tingkat organisasi dan nilai akhir.

#### **10. Pentingnya Diklat**

Pentingnya Diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau permintaan pasar. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja akan berhubungan dengan hakekat pendidikan dan pelatihan.

Hasibuan menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral pegawai. Dengan kata lain 2 orang yang mendapatkan pendidikan secara berencana cenderung lebih dapat bekerja secara terampil/profesional jika dibandingkan dengan orang (pegawai) pada organisasi yang tidak memberikan kesempatan seperti itu. Sehingga Diklat dirasa makin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi kerja, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin ketat persaingannya didalam suatu organisasi.

Pendidikan yang baik dapat membawa peserta ke arah perubahan sikap dan tingkah laku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini menuntut keprofesionalan dalam mendesain pendidikan dan pelatihan, dan melibatkan pengelolaan yang baik dan benar sehingga memperjelas makna dan esensi dari suatu pelatihan tersebut. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki kinerja pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Hal tersebut memberikan arti bahwa pelatihan merupakan suatu yang penting untuk diberikan kepada pekerja (pegawai) yang ada dalam organisasi guna menciptakan prestasi yang lebih baik, sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi itu sendiri. Pengertian diatas memberi gambaran bahwa pelatihan mempunyai karakteristik dapat memberi kontribusi bagi peserta pelatihan. Kontribusi yang diharapkan dari pelatihan tersebut setidaknya-tidaknya antara lain: a) Dapat memperbaiki sikap dan perilaku (performance), b) Mempersiapkan promosi untuk jabatan yang lebih rumit dan sulit, c) Mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi.

Karakteristik pelatihan ini satu hal yang sangat penting mendapat perhatian dari pelaksana dan penanggung jawab pelatihan, sehingga pelatihan itu dapat memberi kontribusi bagi peserta pelatihan. Secara umum pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan antara lain: 1) Meningkatkan semangat kerja; 2) Pembinaan budi pekerti; 3) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4) Meningkatkan tarap hidup; 5) Meningkatkan kecerdasan; 6) Meningkatkan keterampilan; 7) Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan; 8) Meningkatkan lapangan kerja; dan 9) Meratakan pembangunan dan pendapatan.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/pekerja baru adalah untuk menguasai pekerjaannya sedangkan bagi pegawai/pekerja

lama untuk meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang maupun di masa datang, meningkatkan produktivitas apabila mendapat promosi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Manullang bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya 3 dilaksanakan pada pekerjaan.

Jadi pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Proses atau langkah-langkah pendidikan dan pelatihan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan: a) Sasaran, b) Kurikulum, c) Sarana, d) Peserta, e) Pelatih, dan f) Pelaksanaan.

Penyelenggara diklat harus terlebih dahulu menetapkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai agar pelaksanaan program diklat dapat diarahkan ke pencapaian tujuan organisasi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ida Nurmayanti. *Peran Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*. <http://bp2sdm.menlhk.go.id/emagazine/index.php/umum/64-peran-pendidikan-dan-pelatihan-diklat-dalam-meningkatkan-kinerja-pegawai.html>. Diunduh pada tanggal 07 Desember 2018

### D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Rizky Amalia (2017)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan	Variabel independen penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen standar akuntansi pemerintahan dan menggunakan jenis data kuesioner	Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah SKPD Kota Medan, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kantor dinas di Kota Medan sebanyak 62 kantor dinas.	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), transparansi dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

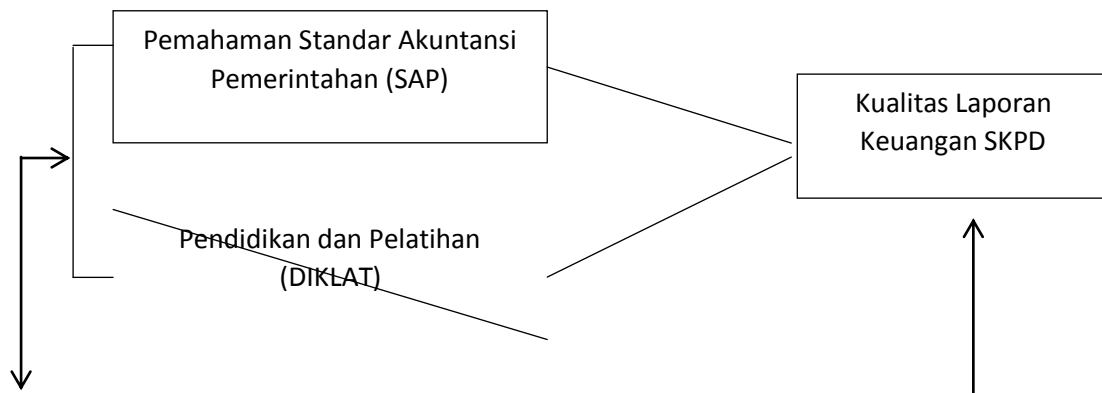
2.	Novi Anggraini	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi	Variabel independen penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen standar akuntansi pemerintahan dan menggunakan jenis data kuesioner	Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah SKPD Kota Tebing Tinggi, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kota Tebing Tinggi yaitu sebanyak 38 SKPD	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi
3.	Arlia Sari Artana (2016)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas	Variabel independen penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen standar akuntansi pemerintahan dan menggunakan jenis data kuesioner	Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah Pegawai SKPD bagian keuangan/akuntansi/tata usaha Wilayah DKI Jakarta, Teknik penentuan sampel dalam	Pemahaman SAP dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan



		Laporan Keuangan pemerintah Daerah		penelitian ini yaitu Convenience Sampling atau sampel non-probabilitas.	Pemerintah Daerah.
4.	Surya Adhitama (2012)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( <i>Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir</i> )	Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan data Kuesioner atau sensus	Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia	Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan daerah, dan Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### E. Kerangka Teoritis

Menurut Uma Sekaran yang dimaksud dengan kerangka teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.<sup>27</sup> Berdasarkan judul penelitian maka penulis menggunakan kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai variabel terikat dan Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan sebagai variabel bebas. Kerangka teoritis dari judul ini dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Skripsi Rizky Amalia, 2017

Gambar 2.1  
Kerangka Teoritis

#### 1. Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan merupakan suatu hal yang penting. Hal ini karena, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-

<sup>27</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016). hal . 23

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika perangkat kerja kurang memahami standar akuntansi pemerintahan maka akan mengurangi efesiensi perangkat kerja dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Namun, apabila perangkat kerja memahami standar akuntansi pemerintahan, maka akan sangat mudah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rizky Amalia yang menemukan hubungan yang signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perangkat kerja masih banyak yang belum mengetahui dan memahami standar akuntansi pemerintahan.

## **2. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Padang Lawas**

Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kepada perangkat kerja untuk mendapatkan suatu pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik dan teori, yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Semakin sering seseorang mengikuti diklat maka akan semakin bertambah pengetahuannya serta semakin meningkat pula keterampilannya dalam bidangnya masing-masing. Sebaliknya, jika seseorang jarang mengikuti diklat maka tidak menutupi kemungkinan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak sebanyak orang yang sering mengikuti diklat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Sari Bunga bahwa diklat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan pelatihan yang diberikan semata-mata hanya formalitas serta ketidaktahuan perangkat kerja mengenai materi yang diberikan. Namun tidak semua

perangkat kerja yang jarang mengikuti diklat akan berarti pendidikan dan pengetahuannya hanya sedikit, karena bisa saja perangkat kerja mendapatkan ilmu pengetahuan tidak melalui diklat.

#### **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih.<sup>28</sup> Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

- $H_0$  : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas
- $H_{a1}$  : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas
- $H_0$  : Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas
- $H_{a2}$  : Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas
- $H_0$  : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas
- $H_{a2}$  : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>28</sup> Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Cet. 1* (Yogyakarta :Pustaka Baru Press, 2015). hal. 45

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variable-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan pemodelan sistematis.<sup>1</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kabupaten Padang Lawas. Waktu penelitian dilakukan selama 1 (satu) minggu yaitu dari tanggal 23 Juli sampai 26 Juli 2019.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang hasilnya dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari tempat objek penelitian dan melengkapinya dengan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>2</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang belum diolah yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh bendahara, kasubbag keuangan dan staff kasubbag keuangan yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

---

<sup>1</sup> Sujoko Efferin. *Metode Penelitian Akuntansi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). hal. 47.

<sup>2</sup> Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. ed. 2. cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2011). hal. 132.

## D. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.<sup>3</sup> Adapun kriteria populasi dari penelitian ini adalah pegawai yang menjabat sebagai Bendahara, Kasubbag Keuangan dan Staff Kasubbag Keuangan SKPD pada 35 SKPD di Kabupaten Padang Lawas. Adapun ke 35 SKPD tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Populasi Penelitian dan Responden**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Dinas Pendapatan Daerah
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Sekretariat
5	Dinas Perhubungan
6	Satpol PP
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Perusahaan Umum
9	Badan Kepegawaian Daerah
10	Pemerintah Desa
11	Dispektorat
12	Dinas Kesehatan
13	Dinas Perumahan
14	Dinas Penanaman Modal

---

<sup>3</sup> Arpan Ikhsan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2014). hal. 105

15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Dinas Sosial
17	Dinas Ketenaga Kerjaan
18	Dinas Pendidikan
19	Dinas Pertanian
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Perizinan
22	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Dinas Ketahanan Pangan
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
25	Dinas Perpustakaan
26	Kantor camat Barumon Selatan
27	Kantor Camat Ulu Barumon
28	Kantor Camat Sosopan
29	Kantor Camat Siapas Barumon
30	Kantor Camat Barumon Tengah
31	Kantor Camat Huristak
32	Kantor Camat Aek Nabara Barumon
33	Kantor Camat Sosa
34	Kantor Camat Hutaraja Tinggi
35	Kantor Camat Batang Lubu Sutam

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Purposive sampling (sampel bertujuan) merupakan

teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan.<sup>4</sup> Kriteria sampel yang diambil dari penelitian ini adalah pegawai yang menjabat sebagai Bendahara, Kasubbag Keuangan dan Staff Kasubbag Keuangan tiap kantor SKPD Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 35 SKPD. Pada penentuan sampel tersebut, peneliti menetapkan 25 kantor SKPD Pemerintahan dengan mengecualikan seluruh kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas tidak dijadikan sampel karena berbagai hal seperti tidak cukupnya waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh. Dari sampel tersebut diambil 3 orang pegawai yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden. Sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah  $25 \times 3 \text{ orang} = 75 \text{ orang responden}$ .

#### **E. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional variabel adalah suatu definisi yang memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel. Adapun yang menjadi definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Variabel Dependen/Terikat**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen ini biasa disebut juga variabel terikat dimana variabel inilah yang menjadi variabel yang akan dipengaruhi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan SKPD. Kualitas laporan keuangan SKPD merupakan kualitas keandalan dari laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang relevan, andal, dapat

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Arpan Ikhsan. Hal. 106

<sup>5</sup> Kurnia Rahma dan Zulkifli. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY)*. Dalam Jurnal Kajian BIsnis Vol. 26, No. 2, 2018, 113 - 130



dibandingkan dan dapat dipahami serta transparan dalam penyajiannya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD.<sup>6</sup>

## 2. Variabel Independen/Bebas

Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pemahaman SAP serta pendidikan dan pelatihan.

### a. Pemahaman SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3), Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar.<sup>8</sup>

### b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip *good governance* dan sesuai

---

<sup>6</sup> <http://bppd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2016/05/1.a-Catatan-Atas-Laporan-Kuangan-.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018

<sup>7</sup> *Ibid*, Kurnia Rahma dan Zulkifli

<sup>8</sup> <https://lib.unnes.ac.id/23342/1/7211411135.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018

dengan peraturan dan sistem yang berlaku. Kemampuan yang diharapkan adalah dapat menyusun laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah). Pelatihan ini ditujukan kepada pegawai pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah.<sup>9</sup>

**Tabel 3.2**  
**Indikator Variabel**

Variabel	Indikator
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca</li> <li>2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran</li> <li>3. Penyajian Laporan Arus Kas</li> <li>4. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Penilaian Persediaan</li> <li>6. Pengakuan Investasi</li> <li>7. Pengakuan Aset Tetap</li> <li>8. Pengakuan Akuntansi Konstruksi</li> <li>9. Perlakuan Akuntansi Kewajiban</li> <li>10. Perlakuan Akuntansi Koreksi Kesalahan</li> </ol>
Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan/aplikasi materi diklat dalam pelaksanaan tugas</li> <li>2. Frekuensi peserta mengikuti diklat</li> <li>3. Kesesuaian materi diklat dengan tugas dan pekerjaan peserta</li> <li>4. Kemampuan/penguasaan peserta terhadap materi diklat</li> <li>5. Partisipasi peserta dalam kegiatan diklat</li> </ol>

<sup>9</sup> <https://www.lpem.org/diklat-keuangan-daerah-bimtek-akuntansi-keuangan-daerah/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018

	6. Pentingnya penyampaian materi diklat 7. Ketersediaan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan diklat
Kualitas Laporan Keuangan	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami

*Sumber: Diolah dari berbagai referensi*

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner (angket). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala likert. Sugiyono menyatakan Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala yang digunakan adalah Likert dengan kategori:

**Tabel 3.3**

**Tabel Skala Pengukuran Likert**

Pertanyaan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

*Sumber: Skripsi Rizky Amalia, 2017*

## G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen pertanyaan yang digunakan benar-benar handal dan sahih untuk digunakan sebagai alat ukur.<sup>10</sup> Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dengan tingkat kesalahan 5%, jika nilai *pearson correlation*  $< 0,05$  disebut valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Sugiharto dan Situnjak menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Ghazali menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai  $r_{xx}$  mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika  $\geq 0,70$ .

---

<sup>10</sup> Zakaria Ian Setiawan dan Rusdiansyah. *Peranan Bauran Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Alat Kesehatan*. Dalam Jurnal Pilar Nusa Mandiri Vol. XII, No.2 September 2016. ISSN 1978 – 1946

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan:

$r_{11}$  = Reliabilitas yang dicari

$n$  = Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum \sigma_t^2$  = Jumlah varians skor tiap-tiap item

$\sigma^2$  = Varians total

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70-0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50-0,70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.<sup>11</sup>

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan dan mengdeskripsikan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Data yang disajikan dalam statistika deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data (mean, median, dan modus), ukuran penyebaran data (standar deviasi dan varians), tabel, serta grafik (histogram, pie dan bar).

## 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi. Syarat asumsi klasik yaitu:

### a) Uji Normalitas

---

<sup>11</sup> Birahmani. Metodologi Penelitian. hal. 69-71.

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan Kolmogorov Sminov test yang terdapat pada program SPSS. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan  $> 0,05$ , maka distribusi datanya dapat dikatakan normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi dengan normal.<sup>12</sup>

b) Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Uji ini menggunakan kriteria Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan bila  $VIF > 10$  terdapat masalah multikolinearitas yang serius sebaliknya bila  $VIF < 10$  tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.<sup>13</sup>

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model

---

<sup>12</sup>Arpan Ikhsan, *et. al. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. hal. 186

<sup>13</sup> Rizky Amalia. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Transparansi, Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Medan*. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017)

regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Metode pengujian yang digunakan adalah *scatterplot*.<sup>14</sup>

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dihitung menggunakan komputer dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Analisis linier berganda digunakan untuk menguji lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Rumus analisis regresi linier berganda yaitu :

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

X<sub>1</sub> = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

X<sub>2</sub> = Pendidikan dan Pelatihan

a = Konstanta

b<sub>1,2,3</sub> = Koefisien Regresi

e = Epsilon atau variabel pengganggu

##### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang celi berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

---

<sup>14</sup> Anwar Hidayat. *Pengertian dan Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser*.  
<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html>. Diakses pada tanggal 17 desember2018

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (explanatory) secara individual dalam menerangkan variabel dependen.<sup>15</sup> Pengujian ini dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas (X) apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y), bentuk pengujian :

$H_0 : X_1, X_2 = 0$ , maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat (Y).

$H_a : X_1, X_2 \neq 0$ , maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat (Y).

Selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan membandingkan tingkat signifikansi (alpha) 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k)$  dari t-hitung yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Jika  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

## 3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan secara simultan terhadap penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas, bentuk pengujian:

$H_0 : X_1 \text{ dan } X_2 = 0$ , maka tidak terdapat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan secara simultan

---

<sup>15</sup> Haslinda dan Jamaluddin. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo*. Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016



terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas.

$H_a : X_1 \text{ dan } X_2 \neq 0$ , terdapat pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas.

Nilai F-hitung nantinya akan dibandingkan dengan nilai F-tabel dengan tingkat signifikansi (alpha) 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k)$  dari F-hitung yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut :

Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Amalia. *Pengaruh Pemahaman SAP*. Hal. 56.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Padang Lawas**

##### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Padang Lawas merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-1.915 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 126 Lintang Utara dan 211 Lintang Selatan, serta 9101 Bujur Barat dan 9553 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah berupa daratan seluas 4.229,99 km<sup>2</sup>. Akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 kecamatan. Luas masing-masing daratan kecamatan, yaitu: Sosopan (407,52 km<sup>2</sup>), Ulu Barumun (241,37 km<sup>2</sup>), Barumun (119,50 km<sup>2</sup>), Barumun Selatan (122,60 km<sup>2</sup>), Lubuk Barumun (300,23 km<sup>2</sup>), Sosa (611,85 km<sup>2</sup>), Batang Lubu Sutam (586,00 km<sup>2</sup>), Hutaraja Tinggi (408,00 km<sup>2</sup>), Huristak (357,65 km<sup>2</sup>), Barumun Tengah (443,09 km<sup>2</sup>), Aek Nabara Barumun (487,75 km<sup>2</sup>), Sihapas Barumun (144,43 km<sup>2</sup>). Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

- a. Barumun-Sosopan: 36 km
- b. Barumun-Ulu Barumun: 7 km
- c. Barumun-Barumun Selatan: 5,93 km
- d. Barumun-Lubuk Barumun: 5 km
- e. Barumun-Sosa: 26 km
- f. Barumun-Batang Lubu Sutam: 50 km
- g. Barumun-Hutaraja Tinggi: 40 km
- h. Barumun-Huristak: 59 km
- i. Barumun-Barumun Tengah: 48 km
- j. Barumun-Aek Nabara Barumun: 26,38 km
- k. Barumun-Sihapas Barumun: 55 km

Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan), dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan).

## 2. struktur organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kabupaten Padang Lawas

### 3. Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas

#### a. Visi

Dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas, potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu:

**“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Beriman : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- 2) Cerdas : Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.
- 3) Sehat : Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi.
- 4) Sejahtera : Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

- 5) Berbudaya : Suatu keadaan dimana keadaan masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.
- 6) Kerja Keras : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.
- 7) Kerja Cerdas : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan akuntabilitas kinerja.

#### **b. Misi**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi
- 2) Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah

- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang
- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.<sup>45</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Pengembalian Kuesioner**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor SKPD di Kabupaten Padang Lawas yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Padang Lawas. Data yang dikumpulkan berasal dari pengisian hasil kuesioner yang dibagikan pada 25 kantor SKPD kabupaten padang lawas. Kuesioner yang disebarkan kepada setiap kantor sebanyak 3 kuesioner yang diisi oleh bendahara, kasubbag keuangan dan staff kasubbag keuangan SKPD yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 75 kuesioner yang penyebarannya dilakukan pada bulan juli 2019. Adapun kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti adalah sebanyak 75 kuesioner sehingga response rate adalah 100% dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 0 kuesioner sehingga data yang siap diolah yaitu sebanyak 75. Dengan data ini maka seluruh kuesioner dapat diolah.

### **2. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji validitas tiap-tiap butir pertanyaan pada kuesioner yang telah dirancang. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila nilai korelasi ( $R$  Hitung) dari butir pertanyaan tersebut  $> R$  tabel. Tabel 4.1 disajikan hasil uji validitas untuk setiap butir-butir

---

<sup>45</sup>Bapak Sulis, Staff Bagian Humas, wawancara pada tanggal 3 juli 2019

pertanyaan pada kuesioner untuk variabel standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan dan kualitas laporan keuangan.

**Tabel 4.1**

**Uji Validitas terhadap Butir-Butir Pertanyaan Kuesioner pada Variabel  
Standar Akuntansi Pemerintahan**

P	R Hitung	R Tabel	Keterangan
SAP1	0.963	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP2	0.921	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP3	0.914	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP4	0.95	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP5	0.912	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP6	0.979	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP7	0.932	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP8	0.95	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP9	0.971	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP10	0.931	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)

**Tabel 4.2**

**Uji Validitas terhadap Butir-Butir Pertanyaan Kuesioner pada Variabel  
Pendidikan dan Pelatihan**

P	R Hitung	R Tabel	Keterangan
PP1	0.606	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
PP2	0.594	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
PP3	0.581	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)



PP4	0.594	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
PP5	0.659	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
PP6	0.814	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
PP7	0.738	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
PP8	0.77	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)

**Tabel 4.3**

**Uji Validitas terhadap Butir-Butir Pertanyaan Kuesioner pada Variabel  
Kualitas Laporan Keuangan**

P	R Hitung	R Tabel	Keterangan
KLK1	0.865	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK2	0.856	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK3	0.697	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK4	0.564	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK5	0.524	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK6	0.636	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK7	0.526	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK8	0.906	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)

Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai R hitung > 0,361 (R Tabel). Diketahui seluruh nilai R hitung > 0.361 (R tabel). Sehingga disimpulkan seluruh pertanyaan telah valid.

**b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas.

Tabel 4.4 berikut hasil dari uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan yang valid.

**Tabel 4.4**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0.98	Reliabel (Cronbach's Alpha > 0,7)
Pendidikan dan Pelatihan (X2)	0.89	Reliabel (Cronbach's Alpha > 0,7)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.904	Reliabel (Cronbach's Alpha > 0,7)

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

$$r_{11} = \left( \frac{26}{26-1} \right) \left( 1 - \frac{29,29}{825,99} \right)$$

$$r_{11} = (1,04)(1 - 0,03)$$

$$r_{11} = (1,04)(0,97)$$

$$r_{11} = (1,00)$$

Dari tabel dan hasil rumus diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel. Diketahui seluruh nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7, sehingga kuesioner telah reliabel.

### 3. Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian analisis statistik deskriptif, disajikan distribusi frekuensi dan persentase dari jawaban responden untuk variabel standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan dan kualitas laporan keuangan.

**Tabel 4.5**

**Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Jawaban Responden untuk Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan**

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
SAP1	0	0	1 3	17.33	1 9	25.33	2 6	34.67	1 7	22.67	75	100
SAP2	2	2.67	1 1	14.67	1 8	24	2 8	37.33	1 6	21.33	75	100
SAP3	2	2.67	1 3	17.33	1 8	24	2 9	38.67	1 3	17.33	75	100
SAP4	1	1.33	1 5	20	1 8	24	2 2	29.33	1 9	25.33	75	100
SAP5	1	1.33	1 6	21.33	1 8	24	2 5	33.33	1 5	20	75	100
SAP6	0	0	1 4	18.67	1 9	25.33	2 3	30.67	1 9	25.33	75	100
SAP7	1	1.33	1 6	21.33	1 8	24	2 8	37.33	1 2	16	75	100
SAP8	2	2.67	1 4	18.67	1 8	24	2 4	32	1 7	22.67	75	100
SAP9	1	1.33	2 0	26.67	1 5	20	2 2	29.33	1 7	22.67	75	100
SAP1	2	2.67	1	21.33	2	26.67	2	32	1	17.33	75	100

0			6		0		4		3			
---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

Berdasarkan Tabel 4.5:

- a. Untuk pertanyaan ke-1 (SAP1), terdapat 13 (17.33%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 19 (25.33%), responden menjawab S sebanyak 26 (34.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
- b. Untuk pertanyaan ke-2 (SAP2), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 11 (14.67%), responden menjawab KS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab S sebanyak 28 (37.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 16 (21.33%)
- c. Untuk pertanyaan ke-3 (SAP3), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 13 (17.33%), responden menjawab KS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab S sebanyak 29 (38.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 13 (17.33%)
- d. Untuk pertanyaan ke-4 (SAP4), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 15 (20.00%), responden menjawab KS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab S sebanyak 22 (29.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 19 (25.33%)
- e. Untuk pertanyaan ke-5 (SAP5), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 16 (21.33%), responden menjawab KS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab S sebanyak 25 (33.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 15 (20.00%)

- f. Untuk pertanyaan ke-6 (SAP6), terdapat 14 (18.67%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 19 (25.33%), responden menjawab S sebanyak 23 (30.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 19 (25.33%)
- g. Untuk pertanyaan ke-7 (SAP7), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 16 (21.33%), responden menjawab KS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab S sebanyak 28 (37.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 12 (16.00%)
- h. Untuk pertanyaan ke-8 (SAP8), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 14 (18.67%), responden menjawab KS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab S sebanyak 24 (32.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
- i. Untuk pertanyaan ke-9 (SAP9), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab KS sebanyak 15 (20.00%), responden menjawab S sebanyak 22 (29.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
- j. Untuk pertanyaan ke-10 (SAP10), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 16 (21.33%), responden menjawab KS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab S sebanyak 24 (32.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 13 (17.33%)

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Jawaban Responden untuk**  
**Variabel Pendidikan dan Pelatihan**

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
PP1	0	0	13	17.33	20	26.67	25	33.33	17	22.67	75	100
PP2	1	1.33	11	14.67	20	26.67	26	34.67	17	22.67	75	100
PP3	2	2.67	17	22.67	17	22.67	24	32	15	20	75	100
PP4	1	1.33	15	20	17	22.67	28	37.33	14	18.67	75	100
PP5	2	2.67	11	14.67	20	26.67	29	38.67	13	17.33	75	100
PP6	1	1.33	10	13.33	15	20	30	40	19	25.33	75	100
PP7	1	1.33	16	21.33	16	21.33	25	33.33	17	22.67	75	100
PP8	1	1.33	12	16	21	28	25	33.33	16	21.33	75	100

Berdasarkan Tabel 4.6:

- a. Untuk pertanyaan ke-11 (PP1), terdapat 13 (17.33%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab S sebanyak 25 (33.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
- b. Untuk pertanyaan ke-12 (PP2), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 11 (14.67%), responden menjawab KS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab S sebanyak 26 (34.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
- c. Untuk pertanyaan ke-13 (PP3), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 17 (22.67%), responden menjawab KS sebanyak 17 (22.67%), responden menjawab

- S sebanyak 24 (32.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 15 (20.00%)
- d. Untuk pertanyaan ke-14 (PP4), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 15 (20.00%), responden menjawab KS sebanyak 17 (22.67%), responden menjawab S sebanyak 28 (37.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 14 (18.67%)
  - e. Untuk pertanyaan ke-15 (PP5), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 11 (14.67%), responden menjawab KS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab S sebanyak 29 (38.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 13 (17.33%)
  - f. Untuk pertanyaan ke-16 (PP6), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 10 (13.33%), responden menjawab KS sebanyak 15 (20.00%), responden menjawab S sebanyak 30 (40.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 19 (25.33%)
  - g. Untuk pertanyaan ke-17 (PP7), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 16 (21.33%), responden menjawab KS sebanyak 16 (21.33%), responden menjawab S sebanyak 25 (33.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
  - h. Untuk pertanyaan ke-18 (PP8), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 12 (16.00%), responden menjawab KS sebanyak 21 (28.00%), responden menjawab S sebanyak 25 (33.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 16 (21.33%)

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Jawaban Responden untuk**  
**Variabel Kualitas Laporan Keuangan**

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
KLK1	1	1.33	14	18.67	23	30.67	23	30.67	14	18.67	75	100
KLK2	1	1.33	17	22.67	19	25.33	20	26.67	18	24	75	100
KLK3	2	2.67	9	12	20	26.67	30	40	14	18.67	75	100
KLK4	2	2.67	18	24	20	26.67	20	26.67	15	20	75	100
KLK5	1	1.33	17	22.67	21	28	19	25.33	17	22.67	75	100
KLK6	2	2.67	20	26.67	16	21.33	18	24	19	25.33	75	100
KLK7	3	4	10	13.33	23	30.67	22	29.33	17	22.67	75	100
KLK8	0	0	16	21.33	15	20	27	36	17	22.67	75	100

Berdasarkan Tabel 4.7:

- a. Untuk pertanyaan ke-19 (KLK1), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 14 (18.67%), responden menjawab KS sebanyak 23 (30.67%), responden menjawab S sebanyak 23 (30.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 14 (18.67%)
- b. Untuk pertanyaan ke-20 (KLK2), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 17 (22.67%), responden menjawab KS sebanyak 19 (25.33%), responden menjawab S sebanyak 20 (26.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 18 (24.00%)
- c. Untuk pertanyaan ke-21 (KLK3), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 9 (12.00%), responden menjawab KS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab



- S sebanyak 30 (40.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 14 (18.67%)
- d. Untuk pertanyaan ke-22 (KLK4), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 18 (24.00%), responden menjawab KS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab S sebanyak 20 (26.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 15 (20.00%)
  - e. Untuk pertanyaan ke-23 (KLK5), terdapat 1 (1.33%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 17 (22.67%), responden menjawab KS sebanyak 21 (28.00%), responden menjawab S sebanyak 19 (25.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
  - f. Untuk pertanyaan ke-24 (KLK6), terdapat 2 (2.67%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 20 (26.67%), responden menjawab KS sebanyak 16 (21.33%), responden menjawab S sebanyak 18 (24.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 19 (25.33%)
  - g. Untuk pertanyaan ke-25 (KLK7), terdapat 3 (4.00%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 10 (13.33%), responden menjawab KS sebanyak 23 (30.67%), responden menjawab S sebanyak 22 (29.33%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)
  - h. Untuk pertanyaan ke-26 (KLK8), terdapat 16 (21.33%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 15 (20.00%), responden menjawab S sebanyak 27 (36.00%) dan responden menjawab SS sebanyak 17 (22.67%)

**Tabel 4.8**  
**Statistics Deskriptif**

	Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	Pendidikan dan Pelatihan (X2)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
N Valid	75	75	75
Missing	0	0	0
Mean	3.5267	3.5750	3.4933
Median	3.6000	3.5000	3.5000
Mode	3.00	3.13	3.25 <sup>a</sup>
Std. Deviation	.82156	.67752	.67343
Minimum	2.00	2.00	2.13
Maximum	5.00	5.00	5.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji  $t$  dan  $F$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$ . Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas  $p$ , dengan ketentuan sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas  $p \geq 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

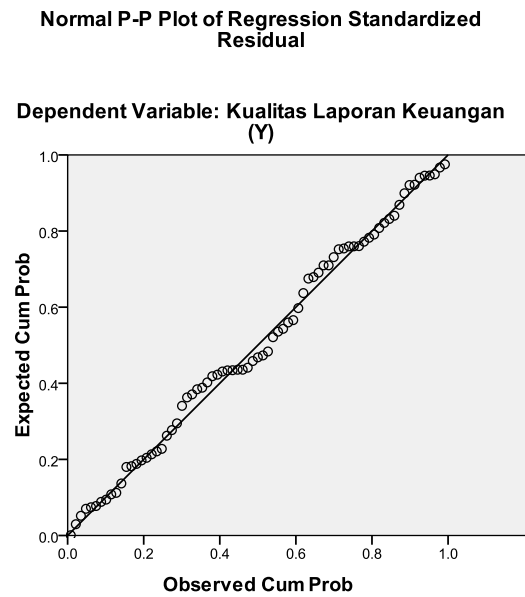
**Tabel 4.9**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.47013115
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.050
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.471
Asymp. Sig. (2-tailed)		.980

a. Test distribution is Normal.

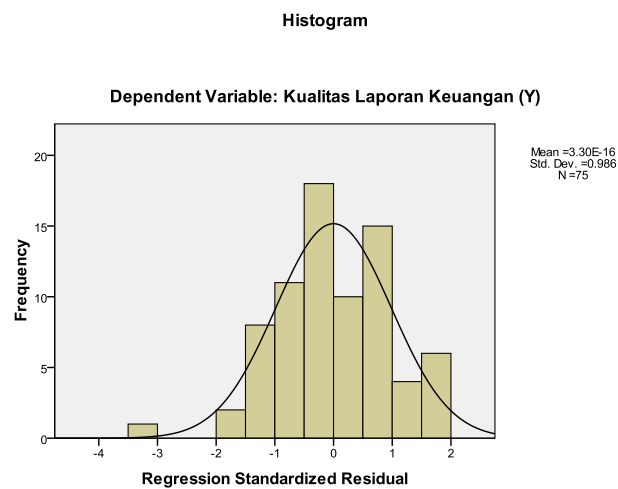
b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,980. Karena nilai probabilitas p, yakni 0,980, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal.



**Gambar 4.2**

### Uji Normalitas *Normal Probability Plot*



**Gambar 4.3**

### Uji Normalitas Histogram

Gambar 4.2 merupakan pengujian normalitas dengan pendekatan *normal probability plot*, sementara pada Gambar 4.3 merupakan pengujian normalitas dengan pendekatan histogram.

Diketahui pada Gambar 4.2, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, sementara pada Gambar 4.3, terlihat kurva berbentuk kurva normal, sehingga data berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.10**

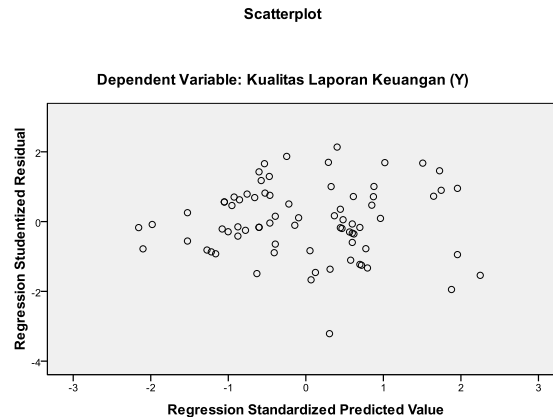
**Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	.773	1.293
	Pendidikan dan Pelatihan (X2)	.773	1.293

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai VIF dari standar akuntansi pemerintahan adalah 1,293 dan nilai VIF dari pendidikan dan pelatihan adalah 1,293. Dikarenakan seluruh nilai  $VIF < 10$ , maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X.



**Gambar 4.4**

### Uji Heteroskedastisitas

Dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.3, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi linear berganda digunakan bila jumlah variabel independennya minimal berjumlah sebanyak 2 variabel independen. Penggunaan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menentukan pengaruh variabel bebas yang biasa disebut dengan  $X$  terhadap variabel tak bebas yang biasa disebut dengan  $Y$ . Tabel 4.11 merupakan hasil analisis regresi linear berganda.

**Tabel 4.11**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.836	.318		2.628	.010		
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	.371	.077	.452	4.835	.000	.773	1.293
Pendidikan dan Pelatihan (X2)	.378	.093	.380	4.061	.000	.773	1.293

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 0,836 + 0,371X_1 + 0,378X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- a. Diketahui nilai konstanta adalah 0,836. Nilai tersebut dapat diartikan apabila standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh, maka nilai variabel dependen kualitas laporan keuangan adalah 0,836.
- b. Nilai koefisien regresi dari standar akuntansi pemerintahan adalah 0,371. Nilai tersebut dapat diartikan ketika standar akuntansi pemerintahan naik sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,371. Dengan kata lain, standar akuntansi

pemerintahan yang semakin baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- c. Nilai koefisien regresi dari pendidikan dan pelatihan adalah 0,378. Nilai tersebut dapat diartikan ketika pendidikan dan pelatihan naik sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,378. Dengan kata lain, pendidikan dan pelatihan yang semakin baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas kualitas laporan keuangan.

**Tabel 4.12**

**Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.203	2	8.602	37.866	.000 <sup>a</sup>
	Residual	16.356	72	.227		
	Total	33.559	74			

a. Predictors: (Constant), Pendidikan dan Pelatihan (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui nilai F hitung 37,866 dan nilai *Sig.* adalah 0,000. Diketahui:

$$Df1 = 2 (X1, X2)$$



$$Df2 = 75 - 2 - 1 = 72$$

Maka nilai F tabel dengan  $df1 = 2$ ,  $df2 = 72$  dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 adalah 3,123. Diketahui nilai F hitung  $37,866 > F$  tabel 3,123 dan nilai *Sig* adalah  $0,000 < 0,05$ , maka standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4.13 menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

**Tabel 4.13**

#### Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.836	.318		2.628	.010		
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	.371	.077	.452	4.835	.000	.773	1.293
Pendidikan dan Pelatihan (X2)	.378	.093	.380	4.061	.000	.773	1.293

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 diperoleh hasil:

1) Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Diketahui nilai koefisien dari standar akuntansi pemerintahan adalah 0,371, yakni bernilai positif. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diketahui nilai  $t$  hitung dari standar akuntansi pemerintahan adalah  $|4,835| > t \text{ tabel } |1,99|$  dan  $Sig$  dari variabel standar akuntansi pemerintahan adalah  $0,000 < 0,05$ , maka standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Variabel Pendidikan dan Pelatihan (X2)

Diketahui nilai koefisien dari pendidikan dan pelatihan adalah 0,378, yakni bernilai positif. Hal ini berarti pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diketahui nilai  $t$  hitung dari pendidikan dan pelatihan adalah  $|4,061| > t \text{ tabel } |1,99|$  dan  $Sig$  dari variabel pendidikan dan pelatihan adalah  $0,000 < 0,05$ , maka pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**c. Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

**Tabel 4.14**

**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 <sup>a</sup>	.513	.499	.47662

a. Predictors: (Constant), Pendidikan dan Pelatihan (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Tabel 4.14, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0,513. Nilai tersebut dapat diartikan variabel standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 51,3%, sisanya sebesar 48,7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

## 7. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan

Hasil uji hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel 4.12. Pada tabel 4.12 mengenai tabel uji signifikansi simultan (uji statistik F) atau uji ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tabel 4.13 mengenai tabel uji parsial (uji statistik t) diperoleh hasil pengujian bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki koefisien regresi sebesar 0,371 dan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung penelitian Novi Angraini (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh pendidikan dan pelatihan

Variabel pendidikan dan pelatihan memiliki koefisien regresi sebesar 0.378 dan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rizky Amalia (2017) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, karena seluruh variabel independen berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten padang lawas adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa *Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
2. Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa *Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
3. Hasil secara simultan membuktikan bahwa *Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)* memiliki pengaruh sebesar 51,7% terhadap *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* dilihat dari uji analisis koefisien determinasi yang dilakukan.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas hendaknya dapat meningkatkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan jalan melakukan seminar atau kursus khusus agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dan SKPD

hendaknya dapat meningkatkan penerapan pendidikan dan pelatihan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah responden tidak hanya mengambil sebagian SKPD tetapi seluruh SKPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dan menambah variabel lainnya seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Surya. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, 2017.
- Alhidayah: Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Tangerang Selatan: P.T. Kalim
- Amalia, Rizky. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Transparansi, Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Medan*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.
- Artana, Arlia Sari. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016.
- Bastian, Indra et. al. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonom*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Bunga, Sari. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, 2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Efrianti, Desi. *Analisis Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2014.  
[https://www.researchgate.net/publication/327788974\\_ANALISIS\\_PENYUSUNAN\\_DAN\\_PENYAJIAN\\_LAPORAN\\_KEUANGAN\\_PEMERINTA](https://www.researchgate.net/publication/327788974_ANALISIS_PENYUSUNAN_DAN_PENYAJIAN_LAPORAN_KEUANGAN_PEMERINTA)

## H\_KABUPATEN\_BOGOR\_BERDASARKAN\_STANDAR\_AKUNTAN SI\_PEMERINTAHAN.

- Eriadi. *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara Dengan Efektivitas Reviu APIP Sebagai Pemoderasi*. Disertasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018.
- Erlina et. al. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Fauziah, Ifat. *Buku Dasar-Dasar Akuntansi: Untuk Orang Awam dan Pemula*. Pamulang: Ilmu, 2017.
- Haslinda dan Jamaluddin. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1. 2016.
- Hidayat, Anwar. *Pengertian dan Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser*. 2013. <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html>.
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/715/7/10510050%20BAB%20III.pdf>.
- Ikhsan, Arpan et. al. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. 2018. [https://topslide.net/view-doc.html?utm\\_source=530-1258-1-pb](https://topslide.net/view-doc.html?utm_source=530-1258-1-pb).
- LPEM FEB UI. *Diklat Keuangan Daerah: Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah*. <https://www.lpem.org/diklat-keuangan-daerah-bimtek-akuntansi-keuangan-daerah/>.
- MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan: UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.



- Nasution, Ibnu. *Pemkab Palas Raih Opini WDP Begini Petuah BPK*. 2018. <https://www.gosumut.com/berita/baca/2018/08/06/pemkab-palas-raih-opini-wdp-begini-petuah-ketua-bpk>.
- Nordiawan, Deddi, dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Nordiawan, Deddi et. al. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Nurhikmah. *Hadis Yang Berhubungan Tentang Pembukuan Pencatatan (Transaksi)*. 2015. <http://hikmahangelf.blogspot.com/2014/04/hadis-yang-berhubungan-tentang.html>.
- Nurmayanti, Ida. *Peran Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*. 2015. <http://bp2sdm.menlhk.go.id/emagazine/index.php/Umum/64-peran-pendidikan-dan-pelatihan-diklat-dalam-meningkatkan-kinerja-pegawai.html>.
- Pakpahan, Edi Saputra et. al. *Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1.
- PP No 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2005.
- Pristiani. *Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Jabatan (Studi pada Dinas Se-Kabupaten Pemalang)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015. <https://lib.unnes.ac.id/23342/1/7211411135.pdf>.
- Rahma, Kurnia dan Zulkifli. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY)*. Jurnal Kajian Bisnis Vol. 26, NO. 2, 2018.

- Setiawan, Zakaria Ian dan Rusdiansyah. *Peranan Bauran Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Alat Kesehatan*. Jurnal Pilar Nusa Mandiri Vol. XII, No.2. 2016. ISSN 1978 – 194.
- Soyomukti, Nurani. *Teori—Teori Pendidikan: Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Suwiknyo, Edi. *Kualitas Laporan Keuangan Pemda Naik*. 2018. <https://finansial.bisnis.com/read/20181006/10/846270/kualitas-laporan-keuangan-pemda-naik-ini-kata-bpk>.
- Tri, Gerry. *Teknik Pengambilan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*. 2013. <http://gerrytri.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html>.
- Triyanti, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Uchiikhusy. *Standar Akuntansi*. 2012. <https://uciikhusy.wordpress.com/2012/02/09/standar-akuntansi/>.
- Wikipedia. *Penelitian Kuantitatif*. 2018. [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kuantitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif)
- Zulkifli. *Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan serta Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017.

[illegible]

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	2	2
3	5	3	3	2	3	3	3	4	5
2	3	3	2	2	2	2	3	2	2
5	5	5	5	4	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	2	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	4	5	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	4	2	4
4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
4	4	4	4	5	4	2	4	2	4
5	4	4	4	4	5	4	4	4	2
4	4	4	5	2	4	4	2	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	2	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
3	3	4	5	3	3	3	5	5	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	5	3	5	5	5	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	5	3	5	5	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	3	4	1	2	2
4	5	4	3	2	4	4	4	5	3
5	4	2	3	4	5	4	5	4	4
3	4	1	2	2	5	3	2	3	5
4	4	4	5	3	3	2	3	2	5
5	4	5	4	4	4	1	4	1	1
5	3	2	3	5	5	5	5	5	2

3	2	3	2	5	3	4	1	5	3
4	1	4	1	1	4	4	2	4	4
5	4	5	5	4	4	5	5	5	4
3	4	1	5	3	2	2	4	2	4
2	3	2	2	2	2	3	3	2	2
2	1	2	2	3	2	2	2	3	3
5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
4	5	4	5	5	4	3	4	2	1

### Hasil Tabulasi Data Variabel Pendidikan dan Pelatihan

PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8
4	4	4	3	4	4	2	4
3	4	2	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	4	4	4	4
2	2	2	2	4	4	4	4
4	4	4	4	2	2	2	2
4	4	4	4	2	2	2	2
4	5	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	5	4	4
4	5	2	2	4	4	4	4
4	4	4	4	2	4	5	4
4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	2	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	2	4	3
3	3	2	3	2	3	3	3
2	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	2	3	2	4	3
3	3	3	2	3	3	3	3
3	4	4	4	3	4	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3
3	4	3	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	3	4	3
2	5	5	2	5	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2
2	5	2	4	4	4	2	2
5	2	2	2	2	5	2	5
2	5	2	5	4	4	2	2
5	2	5	4	4	4	2	5
5	5	2	2	5	2	5	2
2	3	3	2	3	3	2	2
3	2	5	3	2	5	3	3

5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	2	2	2	2
5	2	2	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5
5	5	2	5	5	5	5	5
5	2	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	3	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4
4	5	4	4	4	4	2	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	3
3	3	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4
4	5	2	3	4	2	3	4
3	4	1	2	2	5	5	5
4	4	4	5	3	3	4	1
5	4	5	4	4	4	4	4
5	3	2	3	5	5	4	5
3	2	3	2	5	5	3	2
4	1	4	1	1	3	2	3
5	5	5	5	2	4	1	4
3	4	1	5	3	5	5	5
4	4	5	5	4	5	5	5
5	3	3	3	4	4	4	2
3	3	2	2	2	2	2	2
2	2	3	3	1	1	2	3
5	5	5	4	4	5	5	5
2	3	4	4	5	5	5	5

### Hasil Tabulasi Data Variabel Kualitas laporan Keuangan

KLK1	KLK2	KLK3	KLK4	KLK5	KLK6	KLK7	KLK8
4	4	4	4	4	4	4	5
3	4	4	2	4	2	4	4
5	4	4	4	4	4	3	4
4	4	3	2	3	4	5	2
4	4	4	4	4	4	3	4
2	2	2	2	2	4	4	4
2	2	2	2	2	4	2	4
4	4	4	4	4	2	2	2
3	5	4	4	4	2	2	2
4	4	4	3	4	3	4	4
3	4	4	4	2	4	4	4
4	4	4	4	4	2	3	4
3	5	4	4	2	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	5	2	3	3	3
2	3	3	3	5	4	3	3
3	5	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	5	3	3	3
3	4	2	2	3	3	3	3
3	3	3	3	3	4	3	4
3	2	3	5	3	3	3	3
3	3	3	5	3	5	3	3
3	3	5	3	3	5	3	3
2	3	3	4	2	2	5	2
2	2	2	2	2	2	3	2
2	2	3	2	5	2	2	2
2	2	2	2	2	2	5	3
2	2	3	2	5	2	2	2
2	2	5	3	2	2	2	2
2	2	2	2	5	3	5	2
5	5	5	2	5	5	3	5
3	5	5	5	5	2	5	5
5	5	5	5	5	5	2	5
3	5	5	3	3	2	5	5
5	5	3	5	5	5	3	2
5	5	5	5	3	5	5	5
2	2	3	2	2	2	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	2	5	5	5	2	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5

5	5	5	4	5	5	5	5
5	3	3	3	3	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	2	4	4	4
4	5	4	4	4	2	4	4
4	4	4	3	2	4	5	4
4	3	4	3	4	4	4	2
4	3	4	4	2	4	4	4
4	2	4	4	4	2	4	2
4	4	4	2	4	4	4	3
4	2	4	4	4	2	4	4
3	3	3	3	3	3	3	4
3	5	3	5	3	4	3	3
4	3	4	3	3	3	4	3
3	3	3	5	3	3	3	4
3	3	5	3	5	3	5	4
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	5	4	4
4	2	3	4	4	2	3	4
4	4	1	2	3	3	2	4
5	4	4	3	2	1	1	5
2	2	1	1	2	3	3	3
5	3	4	3	2	1	1	4
4	4	4	1	2	2	3	4
3	5	4	2	1	5	5	4
2	5	5	2	3	4	4	5
1	1	5	3	3	5	5	5
5	2	4	4	5	5	4	5
4	5	4	5	5	5	4	5
4	4	2	4	4	5	4	2
3	3	3	2	3	3	1	2
3	2	2	3	3	2	2	2
5	5	4	5	5	5	4	5
2	3	4	2	4	5	5	4

Uji Validitas dan Reliabilitas berdasarkan Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Pendidikan dan Pelatihan (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

### Reliability Statistics



Cronbach's Alpha	N of Items
.988	10

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SAP1	31.1333	88.120	.963	.986
SAP2	30.9667	90.240	.921	.987
SAP3	31.0000	88.069	.914	.987
SAP4	30.9667	89.757	.950	.986
SAP5	30.8667	89.154	.912	.987
SAP6	30.9333	84.133	.979	.986
SAP7	30.9667	86.102	.932	.987
SAP8	30.9667	89.757	.950	.986
SAP9	30.8000	86.441	.971	.986
SAP10	31.0000	85.655	.931	.987

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	8

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	24.1333	36.120	.606	.882
PP2	23.8000	34.579	.594	.884
PP3	23.9333	34.547	.581	.886
PP4	23.9667	36.516	.594	.883
PP5	23.6667	35.264	.659	.877
PP6	23.8333	31.937	.814	.861
PP7	23.8333	32.557	.738	.869
PP8	24.1667	34.489	.770	.868

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.904	8

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KLK1	24.7000	37.734	.865	.876
KLK2	24.6000	37.076	.856	.876
KLK3	24.2667	40.547	.697	.892
KLK4	24.2667	41.995	.564	.903
KLK5	24.3333	41.954	.524	.908
KLK6	24.5000	40.810	.636	.897

KLK7	24.7000	43.803	.526	.905
KLK8	24.6333	36.792	.906	.872

Distribusi Frekuensi dan Persentase Jawaban Responden berdasarkan Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Pendidikan dan Pelatihan (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%
SAP1	0	0	1 3	17.33	1 9	25.33	2 6	34.67	1 7	22.67	75	100
SAP2	2	2.67	1 1	14.67	1 8	24	2 8	37.33	1 6	21.33	75	100
SAP3	2	2.67	1 3	17.33	1 8	24	2 9	38.67	1 3	17.33	75	100
SAP4	1	1.33	1 5	20	1 8	24	2 2	29.33	1 9	25.33	75	100
SAP5	1	1.33	1 6	21.33	1 8	24	2 5	33.33	1 5	20	75	100
SAP6	0	0	1 4	18.67	1 9	25.33	2 3	30.67	1 9	25.33	75	100
SAP7	1	1.33	1 6	21.33	1 8	24	2 8	37.33	1 2	16	75	100
SAP8	2	2.67	1 4	18.67	1 8	24	2 4	32	1 7	22.67	75	100
SAP9	1	1.33	2 0	26.67	1 5	20	2 2	29.33	1 7	22.67	75	100
SAP10	2	2.67	1 6	21.33	2 0	26.67	2 4	32	1 3	17.33	75	100

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%

PP 1	0	0	1 3	17.33	2 0	26.67	2 5	33.33	1 7	22.67	75	100
PP 2	1	1.33	1 1	14.67	2 0	26.67	2 6	34.67	1 7	22.67	75	100
PP 3	2	2.67	1 7	22.67	1 7	22.67	2 4	32	1 5	20	75	100
PP 4	1	1.33	1 5	20	1 7	22.67	2 8	37.33	1 4	18.67	75	100
PP 5	2	2.67	1 1	14.67	2 0	26.67	2 9	38.67	1 3	17.33	75	100
PP 6	1	1.33	1 0	13.33	1 5	20	3 0	40	1 9	25.33	75	100
PP 7	1	1.33	1 6	21.33	1 6	21.33	2 5	33.33	1 7	22.67	75	100
PP 8	1	1.33	1 2	16	2 1	28	2 5	33.33	1 6	21.33	75	100

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%
KLK 1	1	1.33	1 4	18.67	2 3	30.67	2 3	30.67	1 4	18.67	75	100
KLK 2	1	1.33	1 7	22.67	1 9	25.33	2 0	26.67	1 8	24	75	100
KLK 3	2	2.67		12	2 0	26.67	3 0	40	1 4	18.67	75	100
KLK 4	2	2.67	1 8	24	2 0	26.67	2 0	26.67	1 5	20	75	100
KLK 5	1	1.33	1 7	22.67	2 1	28	1 9	25.33	1 7	22.67	75	100
KLK 6	2	2.67	2 0	26.67	1 6	21.33	1 8	24	1 9	25.33	75	100
KLK	3	4	1	13.33	2	30.67	2	29.33	1	22.67	75	100

7			0		3		2		7			
KLK			1		1		2		1			
8	0	0	6	21.33	5	20	7	36	7	22.67	75	100

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

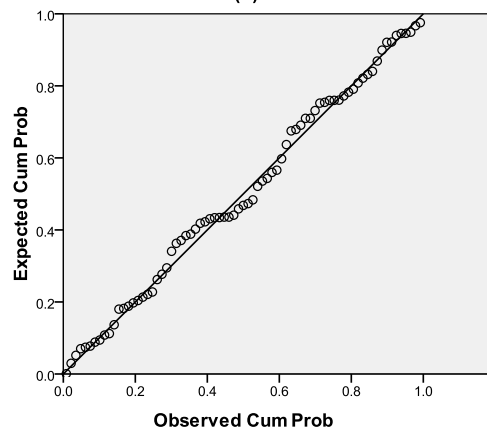
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a, b</sup>		
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.47013115
Most Extreme Differences	Extreme Absolute	.054
	Positive	.050
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.471
Asymp. Sig. (2-tailed)		.980

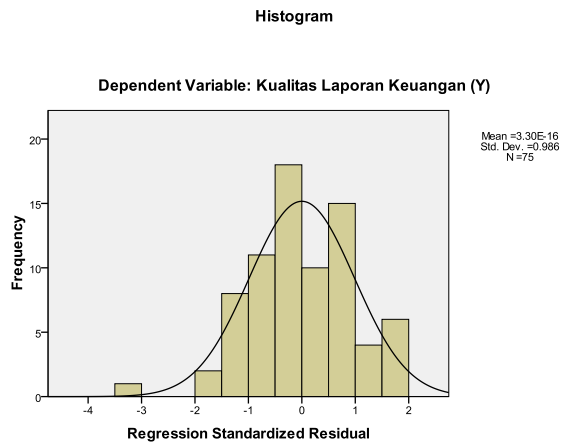
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

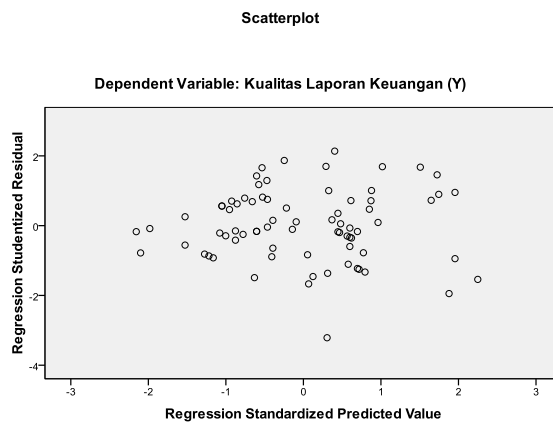




### Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	.773	1.293
Pendidikan dan Pelatihan (X2)	.773	1.293

### Uji Heteroskedastisitas



### Koefisien Determinasi

#### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendidikan dan Pelatihan (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 <sup>a</sup>	.513	.499	.47662

a. Predictors: (Constant), Pendidikan dan Pelatihan (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

### Uji Simultan (Uji F)

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.203	2	8.602	37.866	.000 <sup>a</sup>
	Residual	16.356	72	.227		
	Total	33.559	74			

- a. Predictors: (Constant), Pendidikan dan Pelatihan (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)
- b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

**Regresi Linear Berganda dan Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.836	.318		2.628	.010		
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	.371	.077	.452	4.835	.000	.773	1.293
Pendidikan dan Pelatihan (X2)	.378	.093	.380	4.061	.000	.773	1.293

- a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)



Tabel t dan Tabel F

fx = =FINV(E4;C4;D4)			
C	D	E	F
df1	df2	Tingkat Signifikansi	F Tabel
2	72	0.05	3.123907

fx = =TINV(D4;C4)		
C	D	E
Df	Tingkat Signifikansi	t Tabel
72	0.05	1.993464

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Pribadi**

1. Nama : Kholila Pohan
2. NIM : 52.15.409.6
3. Tpt/Tgl.Lahir : Sihuik, 08 November 1995
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Desa Sihuik Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas

### **II. Riwayat Pendidikan**

1. Tamatan SD Negeri 0510 Sihuik Berijazah 2008
2. Tamatan MTS Negeri 1 Sibuhuan Berijazah 2011
3. Tamatan SMA Negeri 1 Barumun Berijazah 2014
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019

### **III. Riwayat Organisasi**

1. Anggota Organisasi IMA MADINA 2017
2. Anggota Organisasi HIPMI PT UIN SU 2017

## KUESIONER PENELITIAN

**Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner**

Kepada

Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bersama ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHOLILA POHAN

NIM : 52154096

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul  
**“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP), PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PADANG LAWAS”**

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

- Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, **karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.**
- Tidak ada jawaban yang salah atau benar pada pilihan Bapak/Ibu/Sdr/i, dan diharapkan memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

KHOLILA POHAN

NIM: 52154096

### Data Responden

1. Nama

.....

2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

3. Umur

.....

4. Nama SKPD

.....

.....

5. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/SMK ☐ D3

☐ S1 ☐ S2

☐ S3

6. Latar Belakang Pendidikan : ☐ Akuntansi ☐ Pertanian

☐ Manajemen ☐ TI

☐ Lain-lain

(.....)

7. Lama Bapak/Ibu Bekerja : ☐ 1-5 Tahun ☐ 6-10 Tahun

☐ 11-20 Tahun ☐ > 20 Tahun

8. Diklat Yang Pernah Diikuti : ☐ Diklat Teknis ☐ Diklat

Fungsional

Bapak/Ibu

☐ Diklat Kepemimpinan

### **Petunjuk Pengisian Kuesioner**

1. Cara pengisian kuesioner adalah:
  - a. Mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan lengkap dan jujur.
  - b. Semua pertanyaan dijawab dengan cara memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu.
2. Terdapat lima alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai berikut:

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Netral (N)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

No	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Penilaian				
		SS	S	N	TS	STS
1	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Neraca					
2	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					
3	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Laporan Arus Kas (LAK)					
4	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)					
5	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Persediaan					
6	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Investasi					
7	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Aset Tetap					
8	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Kontruksi dalam Pengerjaan					
9	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Kewajiban					
10	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa					

Sumber: Novi Anggraini, 2017

No	Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	SS	S	N	TS	STS
1	Diklat yang diikuti pegawai dapat meningkatkan produktifitas kerja					
2	Diklat sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan SKPD					
3	Pegawai mengikuti semua diklat dengan seksama					
4	Diklat yang diikuti pegawai dapat menambah pemahaman tentang SAP dan penyusunan laporan keuangan SKPD					
5	Diklat yang diikuti sesuai dengan bidang pekerjaan pegawai					
6	Materi diklat sesuai dengan tujuan diklat dilakukan					
7	Setelah mengikuti diklat apakah pegawai menerapkan pengetahuannya dalam menyusun laporan keuangan SKPD					
8	Setelah mengikuti diklat apakah pegawai menjalin komunikasi yang lebih baik dengan BPK dalam hal laporan keuangan					

Sumber: Dari Berbagai Sumber

No	Kualitas Laporan Keuangan	SS	S	N	TS	STS
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu					
2	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu					
3	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan secara lengkap					
4	Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan					
5	Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material					
6	Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi					
7	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
8	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna					

Sumber: Novi Anggraini, 2017